

KETERKAITAN PERAN ANTAR LEMBAGA DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA

Linkage of Roles Between Institutions for Agricultural Development in Indonesian Border Area

Muhammad Arsyad¹⁾, Andi Nuddin²⁾, Imam Mujahidin Fahmid¹⁾, Darmawan
Salman¹⁾, Dwia Aries Tina Pulubuhu³⁾, Andi Alimuddin Unde³⁾, Abd Rasyid J⁴⁾,
Achmad Amiruddin¹⁾

¹⁾Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin,

²⁾Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Parepare

³⁾Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

⁴⁾Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin

Email : arsyad@unhas.ac.id

Submit: 28 December 2020, Revised: 2 January 2021, Accepted: 10 January 2021

ABSTRACT

One of the fundamental problems are faced by agricultural development in Indonesian border areas is that, the role of each institution related to agricultural development has not been clearly mapped, causing ego-sectoral development. This study analyzes the relationship between the roles of institutions in agricultural development at the border, with the Interpretative Structural Modeling (ISM) method and is located in three border provinces with other countries: (1) North Kalimantan-Malaysia, (2) Papua-Papua New Guinea, and (3) East Nusa Tenggara-Timor Leste. The results show that, first, in terms of the interrelated roles of the actors operating in agricultural development, it was found that one of the determining aspects of strengthening agricultural institutions at the border is the inter-institutional coordination function (interconnection). Second, priority actors are distributed into independent and linkage sectors (average coefficient of DP = 0.79) and dependent (D = 0.37), namely: (1) Ministry of Village and Development of Disadvantaged Areas & Transmigration, (2) Ministry of Marine Affairs and Fisheries, (3) Ministry of Agriculture / Directorate General of Plantation, (4) Ministry of Industry and Trade, (5) Ministry of Marine Affairs and Fisheries. (6) Provincial/District offices for Village Community Empowerment Agency (BPMD), (7) Industry & Trade Service (Province), (8) Maritime and Fishery Service (province/district), (9) Transportation Service (Province/District), (10) Services office for Agriculture/Plantation (Province/District), (11) Marketing Institutions/Agricultural Cooperatives, (12) Banking Institutions, (13) Office of Cooperatives/SMEs (District), (14) Farmer Groups/Joined Farmers Group (Gapoktan), and (15) Agricultural/Plantation Extension Agencies (District). Four of them are key actors, namely: (1) Agriculture/ Plantation Service (Province/District), (2) Agricultural/Plantation Extension Agency (District), and (3) Gapoktan. If disaggregated by level, institutions that have a very important role in strengthening agricultural institutions at the border are: (1) Ministry of Agriculture/Directorate General of Plantations, (2) Agricultural/Plantation Research Center (Balitbang Pertanian), and (3) Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Areas and Transmigration.

Keywords: *Agricultural Institutions, Border Area, Interpretative Structural Modeling.*

ABSTRAK

Salah satu persoalan fundamental yang dihadapi pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia adalah peran masing-masing lembaga terkait dengan pembangunan pertanian belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Penelitian ini menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di perbatasan dengan Metode Interpretative Structural Modeling (ISM) dan berlokasi di tiga provinsi perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Kalimantan Utara-Malaysia, (2) Papua-Papua Nugini, dan (3) Nusa Tenggara Timur-Timor Leste. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran yang beroperasi dalam pembangunan pertanian, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan adalah fungsi koordinasi antar lembaga (interkoneksi). *Kedua*, lembaga-lembaga pemeran prioritas terdistribusi ke dalam sektor *independent* dan *linkage* (koefisien rata-rata DP = 0,79) dan *dependent* (D=0,37) yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan Perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/Kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Jika dipilah berdasarkan tingkatannya, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kata Kunci: *Kelembagaan Pertanian, Wilayah Perbatasan, Interpretative Structural Modeling.*

PENDAHULUAN

Kelembagaan tidak hanya dibatasi pada pendeskripsian bentuk dan format organisasi, melainkan juga regulasi sebagai aturan main, konvensi, norma dan sistem nilai yang telah dianut dalam tatanan sosial kemasyarakatan, yang mengatur perilaku baik secara personal maupun organisasi dan menunjukkan bagaimana tindakan kolektif dapat dibangun (*collective action for development*). Artinya entitas kelembagaan dapat dipandang sebagai salah satu masalah kompleks pembangunan pertanian.

Dalam pembangunan pertanian, perdesaan dan keberlanjutan sumberdaya alam, peran aransemen kelembagaan menjadi modal sosial sebagai perekat keterlibatan individu dalam masyarakat menjadi sangat penting. Semua ini menjadi faktor penentu keberhasilan program

intervensi dan perubahan sosial menuju tingkatan yang lebih maju. Revolusi pertanian 4.0 mensyaratkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia, modal sosial dan aransemen kelembagaan menuju tingkat efisiensi dan efektivitas sistem rantai nilai dari hulu, tengah dan hilir (Arifin, 2019). Itu artinya bahwa keberhasilan pembangunan pertanian akan sangat ditentukan oleh level aransemen kelembagaan pertanian yang ada.

Kelembagaan pembangunan pertanian adalah kelembagaan yang berfungsi mendorong perubahan terencana pada bidang pertanian. Kelembagaan demikian termanifestasikan sebagai struktur organisasi dan aturan main yang mempengaruhi arah dan percepatan perubahan pertanian. Dalam keberfungsian demikian itulah, kelembagaan pembangunan pertanian mempolakan perilaku individu petani maupun kolektifitas masyarakat tani

untuk terus berubah mengikuti derap spirit zaman. Perubahan pola pertanian ditentukan oleh fungsi kelembagaannya. Oleh karena itu, mengidentifikasi dan memetakan entitas kelembagaan yang beroperasi dalam pembangunan pertanian pada wilayah terluar Indonesia (Salman, 2019) yang menjadi sangat penting dan tidak dihindari sebagai komponen pembangunan (Arsyad, Nuddin, Yusuf, 2013; Kun, 2013; Arsyad et al., 2020), terutama untuk mengantisipasi konflik penggunaan sumberdaya pertanian di wilayah perbatasan.

Salah satu program terobosan pemerintah Kabinet Indonesia Maju adalah berupa meningkatkan ekspor, termasuk didalamnya ekspor produk pertanian untuk mengatasi defisit neraca perdagangan. Pemerintah perlu membangun Indonesia dari pinggiran terluar (termasuk perbatasan negara) dan menjadikan pembangunan pertanian sebagai pintu masuk peningkatan kesejahteraan (Kariyasa, 2019) dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan (Bappenas, 2013), penyediaan lapangan kerja, sumber devisa dan pertumbuhan ekonomi nasional (Arsyad, Sinaga, Yusuf, 2011; CRIEC-World Bank, 2002). Selain itu, perlu mengupas permasalahan yang dihadapi petani seperti lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga, budidaya pertanian yang belum menjadi prioritas utama, harga produk pertanian yang belum stabil (Kariyasa, 2019; Arsyad dan Yusuf, 2010), semuanya menjadi instrumen penting pembangunan pertanian. Sementara wilayah perbatasan negara merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Permasalahan menyangkut perbatasan memiliki dimensi yang sangat kompleks, pembangunan wilayah perbatasan tidak hanya menggunakan perspektif geografis dan perspektif politik saja, tetapi juga harus menggunakan perspektif sosial karena akan berbicara tentang orang-orang yang menghuni dan melintasi perbatasan (Bangun, 2017) terutama untuk mempertahankan penghidupan (*livelihood*) dan pertahanan terhadap kemiskinan (Arsyad dan Kawamura, 2010). Perbatasan,

terutama perbatasan negara merupakan salah satu aspek penting dalam geopolitik. Sejarah mencatat bahwa banyak terjadi perang antarnegara dan atau antarbangsa disebabkan oleh permasalahan perbatasan (Marwasta, 2020) dari berbagai sektor pembangunan. Selain itu, aspek sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan juga masih sangat dominan terkait dengan kompleksitas pembangunan pertanian/perdesaan (baik batas daratan maupun lautan) dan memerlukan penguatan kelembagaan di wilayah tersebut.

Setidaknya ada tiga persoalan fundamental yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang terkait dengan kelembagaan di wilayah perbatasan Indonesia. *Pertama*, keterkaitan fungsional antar lembaga yang beroperasi dalam pembangunan pertanian belum terdeskripsikan dengan baik. *Kedua*, peran masing-masing lembaga yang terkait dengan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan belum terpetakan dengan jelas menyebabkan pembangunan menjadi ego-sektoral. Sementara salah satu harapan besar pemerintah di era revolusi industri 4.0 untuk menopang produksi dan ekspor pertanian nasional ke pasar global (termasuk Uni-Eropa), ada di wilayah perbatasan Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, maka Indonesia sangat membutuhkan data, informasi, pemetaan peran dan analisis strategis penguatan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia sebagai pijakan pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun kebijakan dan program peningkatan produksi pertanian yang berdaya saing internasional, serta mengantisipasi konflik penggunaan sumberdaya pertanian. Artikel ini secara khusus bertujuan menganalisis keterkaitan peran antar lembaga dalam pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia.

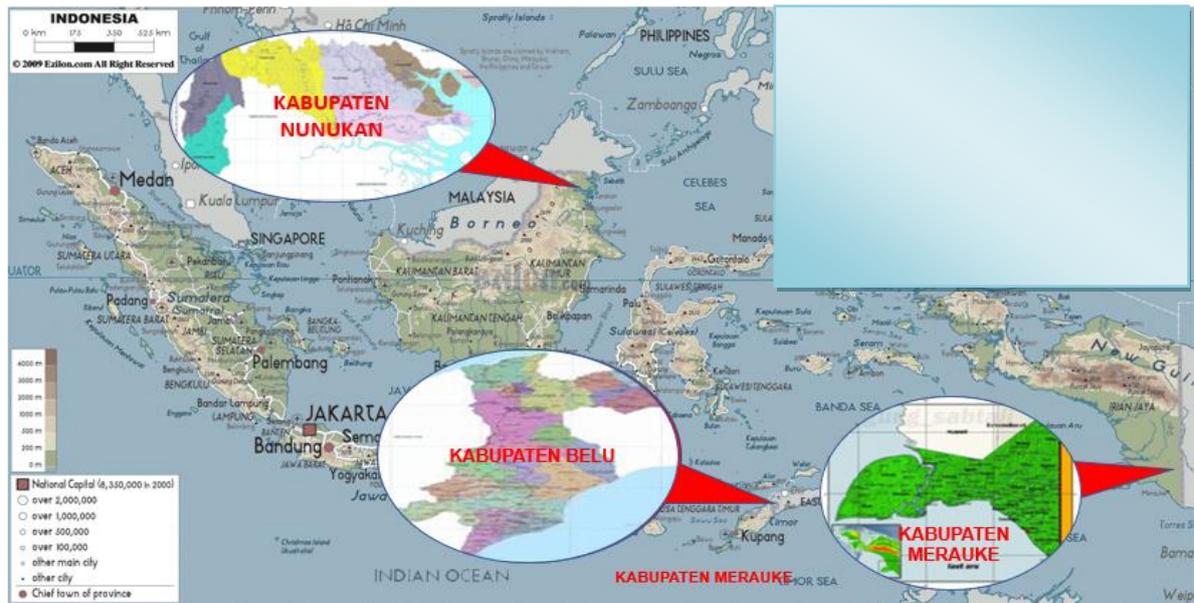
METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di tiga provinsi yang memiliki wilayah perbatasan dengan negara lain, yaitu: (1) Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan

Malaysia, (2) Provinsi Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste (Gambar 1).

Jenis dan Sumber Data. Dua blok data utama yang diperlukan; *Pertama*, data sekunder adalah data/informasi aktual yang telah didokumentasikan melalui institusi terkait yang baik yang pro maupun kontra terhadap

penguatan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia. Data yang dimaksudkan adalah data/informasi yang dapat menunjang penguatan fungsi dan keterkaitan peran lembaga-lembaga dalam kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. *Kedua*, data primer adalah yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner (Tabel 1).



Gambar 1. Lokasi Penelitian di Wilayah Perbatasan.

Tabel 1. Struktur dan Karakteristik Data untuk Kebutuhan Analisis Kelembagaan Pertanian di Wilayah Perbatasan

| Data | Karakteristik Data | Kegunaan Data | Sumber Data |
|---|--|--|---|
| Data tentang lembaga-lembaga yang seharusnya berperan dalam kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan Indonesia | Lembaga lembaga sebagai pemeran dalam penguatan kelembagaan petani, menurut posisi: 1. Posisi lembaga pada masing-masing sektor: - <i>independent</i> - <i>linkage</i> - <i>dependent</i> - <i>autonomous</i> 2. Skor <i>driver-power</i> dan <i>dependent</i> | 1. Untuk memetakan peran lembaga dalam kelembagaan pembangunan pertanian 2. Untuk mengidentifikasi keterkaitan fungsi antar lembaga dalam penguatan kelembagaan pembangunan pertanian | Wawancara dengan pakar (32 sub-elemen dan 473 pertanyaan) |

Teknik Pengumpulan Data. Tahapan-tahapan kegiatan pengumpulan dan dilakukan sesuai dengan teknik analisis data yaitu teknik *Interpretative Structural Modeling* dengan tahap berikut: *Pertama*, Penetapan elemen dan sub elemen. Ada dua elemen dalam analisis ini; (i) lembaga-lembaga pemeran dalam kelembagaan pembangunan pertanian, dan (ii) strategis yang dibutuhkan dalam penguatan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Setiap elemen dijabarkan atas sejumlah sub-elemen berdasarkan pertimbangan: (1) tujuan penelitian yang ingin dicapai, (2) model analisis, dan (3) hasil konsultasi pakar/praktisi yang berkaitan dengan pembangunan pertanian. *Kedua*, Untuk mengidentifikasi peran dan keterkaitan fungsional antar lembaga dalam penguatan kelembagaan pembangunan pertanian, diperoleh 32 lembaga (sub-elemen) yang akan dianalisis untuk menunjukkan lembaga-lembaga prioritas dan bagaimana keterkaitan peran antar lembaga tersebut dalam penguatan kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. *Ketiga*, penyusunan kuesioner, didasarkan pada elemen dan sub elemen yang telah ditetapkan lebih awal. Kuesioner disusun berdasarkan sub-elemen sejumlah 32 butir, sehingga menghasilkan pertanyaan sejumlah 473 butir pertanyaan. *Keempat*, penetapan sampel pakar (*purposive*) untuk analisis sistem pakar (*expert system approach*) (Eriyatno, 1999), dengan ketentuan: (i) mewakili personil pada bidang/instansi masing-masing, (ii) memiliki tingkat pemahaman, penguasaan, dan/atau terlibat langsung dalam bidang pertanian. Keseluruhan sampel ini terdistribusi masing-masing ke setiap provinsi/kabupaten, yaitu: (1) Kalimantan Utara/ Kabupaten Nunukan, (2) Papua/ Kabupaten Merauke, dan (3) Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Kabupaten Belu.

Pengolahan dan Analisis Data. Data yang diperoleh di lapangan diproses dengan menggunakan teknik analisis *Interpretative Structural Modeling* (Eriyatno, 1999), yaitu untuk menganalisis data/informasi tentang: (1) sub-sub elemen sebagai lembaga pemeran dalam kelembagaan pembangunan pertanian, dan (2) sub-sub elemen sebagai program strategis dalam penguatan kelembagaan

pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Analisis data teknik ISM dilakukan dengan tahapan utama sebagai berikut: (i) Menyusun *structural self-interaction matrix (SSIM)* dengan menggunakan hasil tabulasi kuesioner, (ii) Menyusun tabel *reachability matrix*, dengan mengganti simbol-simbol V, A, X, O pada kuesioner dengan angka 1 dan 0, (iii) Menyusun *Matrix Driver Power - Dependent (DP - D)* yang terdiri dari empat kuadran (sektor), (iv) Menyusun model struktural (tingkat level) setiap elemen.

Berdasarkan *Matrix Driver Power - Dependent* dapat ditetapkan kepentingan setiap sub-elemen, melalui empat sektor (Gambar 2).

1. Posisi *independent*, menunjukkan bahwa sub-elemen di kuadran (sektor) ini merupakan variabel bebas, artinya memiliki kekuatan penggerak (*driver power*) yang besar ($> 0,50$) sedangkan kebergantungan (*dependent*) pada sub-elemen lainnya kecil ($\leq 0,50$). Karena itu sub-elemen di sektor ini merupakan variabel *independent* yang memiliki pengaruh atau daya penggerak yang besar untuk mencapai tujuan program, disamping tidak/kurang terpengaruh terhadap sub-elemen lainnya.
2. Posisi *linkage*, menunjukkan bahwa sub-elemen yang ada di sektor ini memiliki *driver power - dependent* yang besar ($> 0,50$). Karena itu sub-elemen di sektor ini merupakan variabel-variabel yang sangat penting bagi program. Sebagai variabel yang memiliki *Driver Power - Dependent* yang besar, harus dikelola secara hati-hati sebab hubungan dengan sub-elemen lainnya tidak stabil. Setiap tindakan terhadap suatu sub-elemen akan memberikan dampak terhadap sub-elemen ini, dan umpan balik pengaruhnya bisa memperbesar dan/atau menimbulkan dampak dan/atau masalah baru. Dengan kata lain, setiap tindakan pada sub-elemen tersebut akan menghasilkan sukses, sebaliknya lemahnya perhatian terhadap sub-elemen ini akan menggagalkan program. Karena itu

lembaga-lembaga yang ada di sektor ini harus berada di bawah kendali manajemen yang stabil untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan pertanian.

3. Posisi *dependent*, menunjukkan bahwa sub-elemen yang ada di posisi ini tidak berpengaruh terhadap program. Namun tidak berarti bahwa tidak hubungannya dengan pembangunan pertanian. Mungkin saja hubungannya kuat, tetapi tidak berdaya dalam pengembangan program (pembangunan pertanian). Sektor ini (*dependent*) adalah kebalikan dari *independent* (Gambar 2). Sebagai sektor *dependnt*, sub- elemen yang tercakup di dalamnya memiliki skor *driver power – dependent* yang lemah ($\leq 0,50$). Karena itu pengaruhnya dalam pengembangan program kecil, di samping kebergantungan

(*dependent*) terhadap sub-elemen lainnya besar ($> 0,50$). Indikasinya adalah sub-elemen di posisi ini tidak memerlukan pengelolaan khusus. Bagi sub elemen yang memiliki potensi terhadap program pembangunan pertanian, akan nyata pengaruhnya berkat pengaruh dari sub elemen lainnya.

4. Posisi *autonomus*, menunjukkan bahwa sub-elemen yang ada di posisi ini tidak berkaitan dengan program, atau hubungannya sangat kecil. Baik *driver power* maupun *dependent* keduanya ($\leq 0,50$). Karena itu sub-elemen yang ada di sektor ini tereleminasi baik sebagai lembaga pemeran, maupun sebagai program prioritas dalam pembangunan pertanian.

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|--|
| Driver Power | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| | 10 | | <i>Independent</i> | | | | | | | <i>Linkage</i> | | | | |
| | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | <i>Autonomus</i> | | | | | | | <i>Dependent</i> | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| <i>Dependent</i> | | | | | | | | | | | | | | |

Gambar 2. *Matrix Driver Power – Dependent*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Peran antar Lembaga dalam Pembangunan Pertanian di Perbatasan

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa dari 32 lembaga yang dianalisis, ada 13 lembaga yang memiliki kekuatan (*driver power*) besar dalam pembangunan pertanian di wilayah perbatasan. Jika sektor pertanian menjadi misi utama pembangunan di wilayah perbatasan, maka ke-13 lembaga tersebut diharuskan menjadi motor penggerak (*power engine*) dalam pengembangan usahatani di wilayah tersebut. Namun perlu dipahami

bahwa meskipun ke-13 lembaga ini berada dalam posisi yang sama, namun ada perbedaan potensi antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan potensi inilah yang ditunjukkan oleh perbedaan skor *driver power* dan *dependent* (Tabel 2).

Keterkaitan Peran Lembaga Tingkat Pusat di Sektor *Independent*

Diantara ke-13 lembaga yang berada pada sektor *independent* (Tabel 2), ada enam lembaga tingkat pusat, yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia,

(3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (4) Asosiasi Industri Kakao Indonesia (AIKI). Hasil analisis ISM (Tabel 2) indikator peran lembaga-lembaga ditunjukkan oleh besaran skor rata-rata *driver power* (DP = 0,79) dan besaran skor rata-rata *dependent* (D = 0,37).

Kementerian Pertanian/ Ditjen Perkebunan, adalah pemeran sangat penting dalam kelembagaan produksi pertanian/perkebunan di daerah perbatasan. Posisi lembaga ini berada di sektor *independent* (DP = 0,84 dan D = 0,44), artinya sebuah lembaga dengan kapasitas daya penggerak besar terhadap lembaga lainnya dalam hal pengembangan produksi pertanian dan perkebunan. Hal ini sesuai dengan tugas yang diemban membantu presiden dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertanian (Perpres RI No. 45 Tahun 2015). Sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang pertanian, lembaga ini menyelenggarakan fungsi perumusan/penetapan, pelaksanaan, kebijakan dalam hal penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi, pemasaran, dan nilai tambah, serta bimbingan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan kementerian pertanian. Khusus tugas kementerian di bidang perkebunan menjadi tanggung jawab Ditjen Perkebunan, yaitu merumuskan/menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang perbenihan dan sarana produksi, budidaya serta perlindungan perkebunan.

Balai Penelitian & Pengembangan Pertanian/Puslit Pertanian, adalah lembaga riset yang di dalamnya tergabung berbagai pusat penelitian pertanian perkebunan. Pusat Penelitian kopi dan Kakao, melakukan penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan khususnya komoditi kopi dan kakao secara nasional (SK. Menteri Pertanian No. 786/Kpts/Org/9/1981). Sebagai pemegang mandat penelitian dan pengembangan kopi dan kakao secara nasional, tugas pokok dan fungsi lembaga adalah: (1) Melakukan penelitian untuk memperoleh varietas/klon dan paket teknologi unggul dalam bidang

budidaya dan pengolahan kopi dan kakao, (2) Memberikan pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani/pekebun kopi dan kakao, (3) melakukan pembinaan sumberdaya petani, dan prasarana/sarana sebagai dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pelayanan. Dengan demikian tugas dan fungsi Puslitkoka sebagai lembaga di tingkat pusat menjadi semakin penting dalam kelembagaan pengembangan produksi pertanian/perkebunan. Demi terbangunnya kelembagaan produksi pertanian/perkebunan yang kondusif, peran Puslitkoka di sektor *independent* (DP = 0,94) sangat vital dalam tatanan koordinasi secara melembaga khususnya dengan sesama lembaga tingkat pusat (Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan), terlebih koordinasi dengan Dinas/Bidang Perkebunan yang ada di daerah (provinsi/kabupaten).

Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengemban tugas sebagaimana diamanahkan dalam Permendes No. 6 Tahun 2015, membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Berdasarkan Permendes sebagai lembaga pemerintahan menyelenggarakan fungsi: (1) Perumusan/penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan kawasan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa, (2) pengembangan daerah tertentu dan pembangunan daerah tertinggal dan penyiapan pembangunan pemukiman dan transmigrasi. (3) koordinasi pelaksanaan tugas kepada seluruh unsur organisasi (4) Melakukan fungsi kontrol /pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, dan (5) melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengindikasikan betapa penting dan besarnya keberkaitan dengan program pengembangan

produksi pertanian di daerah perbatasan yang harus ditunjang dengan penguatan koordinasi dengan lembaga lainnya. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berada ada posisi *independent* (DP = 0,94 dan D = 0,06). Besarnya skor DP dan kecilnya skor D adalah indikasi

bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai lembaga tingkat pusat yang harus proaktif melakukan advokasi untuk mempengaruhi pemangku kepentingan guna merumuskan dan mengambil kebijakan pengembangan produksi di daerah perbatasan Indonesia.

Tabel 2. Posisi Lembaga-Lembaga Pemeran dalam Kelembagaan Pembangunan Pertanian di Wilayah Perbatasan Menurut Skor *Driver Power-Dependent* (DP-D)

| Posisi | Lembaga Pemeran | Skor | |
|--------------------|---|--------------------|------|
| | | DP | D |
| <i>Independent</i> | 1. Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan | 0,81 | 0,44 |
| | 2. Balai Penelitian & Pengembangan Pertanian/Puslit Pertanian | 0,94 | 0,06 |
| | 3. Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmig. | 0,94 | 0,06 |
| | 4. Lembaga Penelitian/PerguruanTinggi | 0,59 | 0,37 |
| | 5. Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan | 0,81 | 0,28 |
| | 6. Dinas Perkebunan Provinsi | 1,00 ^{*)} | 0,19 |
| | 7. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Provinsi) | 0,69 | 0,41 |
| | 8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi | 0,51 | 0,34 |
| | 9. Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian | 0,78 | 0,37 |
| | 10. Dinas Pertanian/perkebunan Kabupaten | 0,59 | 0,47 |
| | 11. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kabupaten) | 0,62 | 0,41 |
| | 12. Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten) | 1,00 ^{*)} | 0,19 |
| | 13. Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) | 1,00 ^{*)} | 0,12 |
| | Rata-rata | 0,79 | 0,37 |
| <i>Linkage</i> | 14. Kementerian Perindustrian dan Perdagangan | 0,78 | 0,51 |
| | 15. Dinas Pertanian Provinsi | 0,72 | 0,52 |
| | 16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten | 0,72 | 0,51 |
| | Rata-rata | 0,74 | 0,51 |
| <i>Dependent</i> | 1. Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan | 0,03 | 0,81 |
| | 2. Kementerian Koperasi dan UKM | 0,12 | 0,56 |
| | 3. Kementerian Perhubungan | 0,06 | 0,66 |
| | 4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | 0,16 | 0,62 |
| | 5. Forum Koordinasi Manajemen Kebun (FKMK) | 0,06 | 0,59 |
| | 6. Dewan Kakao Indonesia | 0,16 | 0,53 |
| | Rata-rata | 0,10 | 0,63 |
| <i>Autonomous</i> | 1. International Cocoa Organization (ICCO) | 0,06 | 0,04 |
| | 2. Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) | 0,25 | 0,47 |
| | 3. Asosiasi Petani Kakao Indonesia (APKI) | 0,31 | 0,31 |
| | 4. Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi | 0,03 | 0,50 |
| | 5. Dinas Koperasi/UKM Provinsi | 0,06 | 0,47 |
| | 6. Dinas Kehutanan &Lingk. Hidup Kabupaten | 0,09 | 0,41 |
| | 7. Dinas Perhubungan Provinsi | 0,06 | 0,50 |
| | 8. Lembaga Perbankan | 0,09 | 0,50 |
| | 9. Dinas Koperasi/Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten | 0,19 | 0,34 |
| | 10. Dinas Perhubungan Kabupaten | 0,06 | 0,47 |
| | Rata-rata | 0,14 | 0,36 |

Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan (AITP), adalah organisasi yang merangkul pelaku usaha industri tanaman perkebunan yang dalam kajian ini diangkat sebagai salah satu sub elemen pendukung program pengembangan produksi pertanian dan perkebunan. Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa *Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan* berada pada posisi *independent* dengan skor *driver power* yang tergolong tinggi (DP = 0,81). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga tersebut memiliki kekuatan/potensi yang besar untuk memajukan bidang pertanian/perkebunan di Indonesia. Kontribusi AITP selama ini lebih banyak pada tataran kebijakan ekspor-impor hasil pertanian/perkebunan. Bentuk pembinaan yang diberikan oleh pelaku usaha industri baru berada pada skala pelaku usahatani yang telah maju, sementara petani kopi dan kakao kita pada umumnya adalah petani kecil dengan tingkat pengetahuan, penguasaan teknologi dan permodalan yang sangat terbatas. Karena itu, hal yang penting dilakukan adalah bagaimana membangun dan memulihkan kepercayaan petani melalui penyuluhan dan transfer pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan petani.

Hasil kajian ini mengisyaratkan bahwa *Asosiasi Industri Tanaman Perkebunan* Indonesia harus berada dalam bingkai kelembagaan melalui koordinasi antar lembaga baik pusat maupun daerah. Yang dibutuhkan sekarang ini adalah bagaimana memulihkan kepercayaan petani sebagai ujung tombak pengembangan kualitas dan kuantitas produksi pertanian Indonesia.

Keterkaitan Peran Lembaga-Lembaga Tingkat Provinsi di Sektor *Independent*

Selain lembaga-lembaga tingkat pusat, ada tiga lembaga di daerah (provinsi), sebagai lembaga perpanjangan tangan pusat yang menempati sektor *independent* yaitu: (1) Dinas Perkebunan Provinsi, (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi dan (3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat/Perguruan Tinggi. (4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi.

Dinas Perkebunan provinsi, mengemban tugas pokok sebagai pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan meliputi produksi dan sumberdaya perkebunan, pengembangan, pelindungan dan pengolahan perkebunan, pemasaran dan usaha perkebunan yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam menjalankan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan Provinsi mempunyai fungsi dalam kewenangan provinsi, dalam hal: (1) penyelenggaraan kebijakan yang bersifat teknis, (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan, dan (3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporansesuai dengan tugas pokok yang diembannya.

Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan provinsi ini menggambarkan kepentingan lembaga ini sebagai salah satu unsur dalam kelembagaan produksi perkebunan yang dapat mengoordinasikan urusan pemerintahan tingkat pusat dengan daerah otonom dalam bidang pengembangan produksi perkebunan dengan hasil pertanian lainnya. Pernyataan ini diperkuat oleh hasil analisis ISM bahwa Dinas Perkebunan Provinsi memiliki skor *driver power* yang besar (DP = 1,00) dan skor *dependent* yang kecil (D = 0,19), sehingga memenuhi syarat sebagai lembaga pemeran kunci dalam kelembagaan produksi perkebunan di daerah perbatasan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) provinsi, adalah lembaga tingkat provinsi dengan skor *driver power-dependent* (DP = 0,69) (D = 0,41). Besaran skor *driver power* yang diperoleh menjadi parameter besarnya pengaruh lembaga tersebut terhadap pemberdayaan sumberdaya manusia. Kepentingan peran yang diemban BPMD tersurat dalam rumusan tugas pokok dan fungsinya untuk membantu gubernur dalam perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat dan program pemerintahan desa di wilayah provinsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dikemukakan terakhir, BPMD berfungsi sebagai fasilitator dan pembina dalam pengembangan sumberdaya

manusia, penyelenggaraan ekonomi dan penerapan teknologi tepat guna.

Dalam kelembagaan pembangunan pertanian, salah satu program yang sangat penting adalah peningkatan produktivitas petani. Karena itu pengembangan sumberdaya petani, dan penguasaan teknologi usahatani harus dilakukan melalui koordinasi antar lembaga terkait, dengan memanfaatkan kekuatan berdasarkan posisi lembaga di masing-masing sektor (*independent*, *linkage* dan *dependent*). Sebagai lembaga di tingkat provinsi, BPMD harus melakukan advokasi agar masing-masing lembaga saling memperkuat dan saling mendukung dalam pelaksanaan program. Selain itu tugas BPMD dapat memacu percepatan para pelaku usahatani untuk mengadopsi program pembangunan. Koordinasi antar lembaga harus dilakukan terutama antara lembaga tingkat provinsi (BPMD provinsi) dan lembaga tingkat kabupaten (BPMD kabupaten).

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)/ Perguruan Tinggi, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya LPPM berfungsi dalam hal: (1) penyusunan rencana induk pengembangan penelitian sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, (2) melaksanakan penelitian ilmiah (murni dan terapan), (3) melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, (4) melaksanakan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat antar perguruan tinggi.

Peran LPPM Perguruan Tinggi dalam kelembagaan produksi pertanian/ perkebunan, dibuktikan dari banyak penelitian dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang merekomendasi berbagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi petani. Demikian pula banyak hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat mengantar petani keluar dari jeratan masalah ekonomi. Selain itu tidak sedikit penelitian yang dilakukan Perguruan Tinggi menghasilkan rekomendasi sebagai bahan

pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang pertanian dan perkebunan. Hal inilah yang menjadi bahan pertimbangan para pakar (narasumber) dalam penelitian ini, sehingga hasil analisis ISM memposisikan LPPM Perguruan Tinggi berada di sektor *independent* (DP = 0,59).

Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi, mengemban tugas dan fungsi antara lain: (1) perumusan kebijakan dan penyusunan program kerja di bidang perindustrian dan perdagangan, (2) pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program, (3) melaksanakan administrasi dan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur di bidang industri dan perdagangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil analisis ISM menempatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi pada posisi *independent* (Tabel 2) dengan perolehan skor *driver power* (DP) = 0,51 dan *dependent*(D) = 0,32. Sebagai lembaga tingkat provinsi yang berada pada posisi *independent*, Dinas Perindustrian dan Perdagangan seyogianya dapat memainkan peran sebagai lembaga koordinator yang dapat menjembatani kebijakan dalam bidang perindustrian dan perdagangan tingkat pusat dengan daerah otonom sebagai lembaga yang lebih bersifat teknis dan operasional.

Keterkaitan Peran Lembaga-Lembaga Tingkat Daerah Otonom/Kelompok Masyarakat di Sektor Independent

Ada lima lembaga tingkat daerah otonom/ kelompok masyarakat yang berada di sektor *independent*, yaitu: (1) Lembaga Pemasaran/ Koperasi Pekebun Kakao (KPK). (2) Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten, (3) BPMD Kabupaten, (4) Badan Penyuluhan Perkebunan Kabupaten, dan (5) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Lembaga Pemasaran/ Koperasi Pertanian dan Pekebunan, memegang peranan penting dalam kelembagaan produksi pertanian. Hasil analisis ISM menunjukkan skor *driver power* yang cukup

tinggi (DP = 0,78) dan menduduki posisi *independent* (Tabel 2). Karena itu diharapkan lembaga pemasaran produksi pertanian, termasuk Koperasi Pekebun Kakao diberdayakan dalam tatanan kelembagaan. Koperasi harus dikembangkan dan diharapkan dapat melakukan pembinaan dalam berbagai aspek baik dari segi peningkatan dan keberlanjutan produksi, pengembangan masyarakat perdesaan, koordinasi antar lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan penguatan unsur kegotongroyongan masyarakat.

Dinas Pertanian/ Bidang Perkebunan kabupaten, bertugas membantu bupati dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian serta tugas pembantuan yang ditugaskan oleh daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Perkebunan berfungsi sebagai penyusun, pelaksana dan pemantau pelaksanaan kebijakan/ program dalam bidang pertanian dan perkebunan yang menjadi urusan pemerintahan daerah otonom.

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa posisi Dinas Pertanian/ Bidang perkebunan Kabupaten berada di sektor *independent* (DP = 0,51). Posisi ini (*independent*) mengindikasikan bahwa pengaruh Dinas Pertanian/Bidang perkebunan Kabupaten sangat besar dalam kelembagaan khususnya dalam peningkatan produksi pertanian/perkebunan. Kedua bidang ini (pertanian dan perkebunan) harus berada dalam bingkai koordinasi yang selaras. Pengalaman di lapangan menunjukkan adanya benturan antara pertanian tanaman pangan dengan tanaman perkebunan khususnya kopi dan kakao. Kasus di beberapa daerah menunjukkan banyaknya petani kakao yang meninggalkan usahatani dan beralih ke komoditas jagung. Akar masalah dari kasus-kasus seperti ini sudah terungkap melalui beberapa penelitian. Meskipun hingga saat ini belum teratasi akibat lemahnya kinerja kelembagaan pertanian/perkebunan.

Badan *Pemberdayaan Masyarakat Desa* (BPMD) kabupaten, adalah lembaga otonom untuk membantu bupati/walikota

dalam perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan dan memfasilitasi program-program pemberdayaan masyarakat dan program pemerintahan desa di wilayah kabupaten. Hasil analisis ISM menunjukkan skor *driver power* lembaga ini (BPMD) mencapai DP = 0,62 dan D = 0,41 (Tabel 2), sehingga berdasarkan struktur kelembagaan, BPMD berada di sektor *independent*, dimana pengaruhnya terhadap pengembangan produksi pertanian/perkebunan cukup besar. Karena itu untuk mencapai tujuan kelembagaan pertanian/perkebunan, BPMD kabupaten harus memperkuat koordinasi dengan lembaga lainnya sehingga mampu mewujudkan program pemberdayaan masyarakat yang dapat menunjang peningkatan produksi.

Badan Penyuluhan Pertanian kabupaten, mengemban tugas menyusun, melaksanakan, kebijakan/ program pemberian bimbingan teknis, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian/ perkebunan. Berdasarkan tugas tersebut, Badan Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi: (1) sebagai penyelenggara penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, (2) penyelenggara bimbingan kelembagaan dan ketenagaan, (3) penyelenggara peningkatan kapasitas dan kemampuan penyuluh, (4) penyelenggara pengembangan metoda penyuluhan, dan (5) penyelenggara pemantauan pelaksanaan penyuluhan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dikemukakan terakhir, Badan Penyuluhan Pertanian adalah lembaga yang berada di garda terdepan untuk mentransfer pengetahuan dan keterampilan agar petani mampu mengelola usahatani semaksimal mungkin. Pernyataan ini didukung oleh hasil analisis ISM yang memposisikan Badan Penyuluhan Pertanian di sektor *independent* sekaligus sebagai lembaga pemeran kunci yang dikuatkan oleh besaran skor *driver power* tertinggi (DP = 1,00).

Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Poktan/Gapoktan), adalah organisasi non formal yang pembentukannya berdasar pada SK Menteri Pertanian No. 237/Kpts/OT.160/4/2007 bahwa Kelompok

Tani (Poktan) adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya. Selanjutnya Gapoktan adalah beberapa kelompok tani bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Meskipun tupoksi kedua organisasi ini tidak diungkap secara gamlang, namun dapat dipahami bahwa baik Poktan maupun Gapoktan mengemban tugas dan fungsi agar sedapatmungkin mengantarkan para anggotanya (petani) lebih produktifitas sehingga mampu mendesain ekonomi keluarganya.

Jika peningkatan produktivitas dan perbaikan ekonomi rumah tangga petani menjadi misi organisasi (Poktan-Gapoktan), dapat dipastikan bahwa keduanya merupakan lembaga yang keberadaanya amat penting dalam kelembagaan pembangunan pertanian, khususnya di wilayah perbatasan. Pernyataan yang dikemukakan terakhir searah dengan hasil analisis ISM, bahwa Poktan/Gapoktan berada pada posisi *independent* dengan besaran skor *driver power* maksimum (DP = 1,00) (Tabel 2). Hal ini menunjukkan bahwa Kelompok Tani/Gapoktan sama dengan Lembaga Penyuluhan menduduki posisi dalam kelembagaan pembangunan pertanian sebagai lembaga pemeran kunci.

Penting untuk dipahami bahwa dalam analisis ISM ini merekomendasikan tiga lembaga sebagai pemeran kunci dalam pengembangan produksi pertanian di daerah perbatasan, yaitu Dinas Perkebunan provinsi, Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan, dan Kelompok Tani/Gapoktan. Sebagai pemeran kunci, ketiga lembaga ini menjamin keberhasilan program peningkatan produksi pertanian/perkebun. Sepanjang Dinas Perkebunan provinsi proaktif melakukan advokasi pengembangan produksi, dan Badan Penyuluhan Pertanian/ Perkebunan masih setia mentransfer pengetahuan/ keterampilan kepada petani, selama itu produksi tetap berjalan. Hal ini akan

semakin nyata jika petani lebih aktif di bawah kendali kelompok tani/gapoktan, selama itu pula produksi pertanian/ perkebunan tetap berlanjut, meskipun dalam kondisi yang belum sesuai dengan harapan, misalnya akibat lemahnya pasar/ ketidakstabilan harga di lapangan.

Keterkaitan Peran Lembaga-Lembaga di Sektor *Linkage*

Ada tiga lembaga yang berada di posisi (sektor) *linkage*, yaitu satu diantaranya adalah lembaga pusat (*Kementerian Perindustrian dan Perdagangan*), satu di tingkat provinsi (*Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi*), dan yang lainnya adalah lembaga tingkat daerah (*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten*). Ketiga lembaga yang dimaksudkan memiliki keunikan yang membedakan dengan yang lainnya baik di sektor *independent*, *dependent*, maupun di sektor *autonomous*. Keunikan lembaga-lembaga di sektor ini karena di samping memiliki power yang besar terhadap keberhasilan pembangunan pertanian/ perkebunan, juga memiliki kebergantungan yang besar terhadap lembaga lainnya. Karena itu ketiga lembaga disektor ini harus ada dibawah kendali manajemen kelembagaan yang kondusif, karena umpan balik pengaruh lembaga lain dapat berdampak terhadap kegagalan atau memunculkan masalah baru dalam pembangunan pertanian.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, sebagai lembaga tingkat pusat yang masing-masing berdiri sendiri sebagai lembaga Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Namun untuk kepentingan analisis penelitian ini kedua kementerian ini disatukan atas pertimbangan tugas pokok dan fungsinya satu dengan lainnya saling menguatkan dalam hubungannya dengan pengembangan produksi pertanian/perkebunan. Permendag. No. 8/M-DAG/PER/2016, bahwa Kementerian Perdagangan adalah penyelenggara fungsi perumusan/ penetapan dan pelaksana kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan dibidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam

negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, peningkatan produk di pasar ekspor, serta pengembangan dan pembinaan di bidang perdagangan. Begitu pentingnya tugas fungsi Kementerian Perdagangan ini sebagai lembaga yang memberikan kontribusi di tingkat pusat dalam pengembangan pasar produksi pertanian dan perkebunan baik secara nasional, terlebih lagi di kancah internasional.

Kementerian Perindustrian mengemban tugas membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perindustrian (Perpres Nomor 29 Tahun 2015), dengan mengemban fungsi utama dalam perumusan, penetapan dan pelaksana kebijakan di bidang perindustrian serta pelaksanaan bimbingan teknis berskala nasional. Melalui koordinasi dengan lembaga di daerah (Dinas Perindustrian Provinsi dan Kabupaten) lembaga ini seharusnya mampu mengangkat dan mengembangkan industri di daerah dengan teknologi yang dapat diadopsi dan di kuasai oleh masyarakat di daerah. Karena itu bukanlah suatu kekeliruan jika analisis ISM dalam penelitian itu menempatkannya sebagai lembaga di sektor *independent* (DP = 0,78) artinya lembaga dengan *driver power* yang besar terhadap keberhasilan program pengembangan pertanian/ perkebunan.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi, mengemban tugas membantu gubernur dalam urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan di tingkat provinsi. Sebagai lembaga pemerintahan di tingkat provinsi. Dalam pengembangan tugas sebagaimana dimaksudkan terakhir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi menyelenggarakan fungsinya sebagai perumus, pelaksana, dan mengevaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan ketahanan pangan di wilayah territorial provinsi.

Hasil analisis ISM menunjukkan bahwa peran lembaga ini berada di sektor *independent* (DP = 0,72 dan D = 0,50). Indikasi dari hasil analisis ini bahwa dalam hal pengembangan produksi pertanian, peran Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan provinsi memiliki kebergantungan yang lebih besar (posisi *linkage*) dengan dinas/badan lainnya (Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten). Koordinasi antar lembaga dalam pengembangan produksi pertanian sangat dibutuhkan untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih program dan/atau adanya program pengembangan yang saling mematikan. Fenomena di lapangan menunjukkan adanya petani (terutama komoditas perkebunan seperti kakao) yang beralih ke komoditi jagung atau bahan pangan lainnya. Kenyataan-kenyataan semacam ini terjadi sebagai paradoks, yang sesungguhnya jika diatasi melalui koordinasi antar lembaga akan semakin menguntungkan petani dan silang kepentingan antara pertanian dan perkebunan tidak akan terjadi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten (Disperindag), mengemban tugas pokok sebagai pelaksana urusan pemerintahan berdasarkan asa otonomi daerah dibidang perindustrian dan perdagangan berdasarkan kewenangan dan kebijakan pemerintah daerah. Karena itu secara kelembagaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten berfungsi sebagai: (1) perumus kebijakan teknis, (2) penyelenggara kebijakan teknis bidang perindustrian dan perdagangan, (3) melakukan pembinaan dan kordinasi lembaga lain terkait pemberian bimbingan teknis perindustrian dan perdagangan, (4) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program di bidang perindustrian dan perdagangan.

Secara kelembagaan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ini amat penting, Kepentingannya tercermin dari fungsinya sebagai pembina dan koordinasi dengan lembaga lainnya terkait dengan urusan perindustrian dan perdagangan. Karena itu peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dalam kelembagaan produksi pertanian sangat vital, khususnya di daerah perbatasan. Pernyataan ini dikuatkan oleh hasil analisis ISM, bahwa Disperindag berada di posisi *linkage*, dengan skor *driver power - dependent* (DP= 0,72 dan D= 0,31). Sebagai lembaga di

posisi *linkage*, dipastikan memiliki daya penggerak yang besar terhadap program peningkatan produksi pertanian, meskipun juga sangat ketergantungan terhadap lembaga lainnya. Adanya sifat ketergantungan inilah sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten harus berada dibawah kendali manajemen yang mendukung pencapaian program.

KESIMPULAN

Dari sisi keterkaitan peran antar lembaga pemeran dalam pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, ditemukan bahwa salah satu aspek penentu penguatan kelembagaan pertanian adalah seberapa besar fungsi koordinasi antar lembaga yang ada di dalamnya terkoneksi dengan baik (interkoneksi). Jaringan interaksi antar lembaga menjadi faktor pendorong utama terciptanya komitmen dalam memahami dan menanggapi persoalan pembangunan pertanian. Sebagai upaya memetakan peran masing-masing lembaga dalam kelembagaan pembangunan pertanian di wilayah perbatasan, ditemukan bahwa lembaga-lembaga pemeran prioritas dalam kelembagaan pembangunan pertanian terdistribusi ke dalam lembaga-lembaga yang ada di sektor *independent* dan *linkage* yaitu: (1) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi, (2) Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (4) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, (5) Kementerian Kelautan dan perikanan. (6) Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) provinsi/kabupaten, (7) Dinas Perindustrian & Perdagangan (Provinsi), (8) Dinas Kelautan dan Perikanan (provinsi/kabupaten), (9) Dinas Perhubungan (Provinsi/kabupaten) (10) Dinas Pertanian/perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (11) Lembaga Pemasaran/Koperasi Pertanian, (12) Lembaga Perbankan, (13) Dinas Koperasi/UKM (Kabupaten), (14) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dan (15) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten). Empat lembaga di

antaranya merupakan lembaga pemeran kunci, yaitu: (1) Dinas Pertanian/Perkebunan (Provinsi/Kabupaten), (2) Badan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan (Kabupaten), dan (3) Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tetapi jika dipilah berdasarkan level kelembagaan, maka lembaga tingkat pusat yang memiliki peranan sangat penting dalam penguatan kelembagaan pertanian di perbatasan yaitu: (1) Kementerian Pertanian/Ditjen Perkebunan, (2) Pusat Penelitian Pertanian/Perkebunan (Balitbang Pertanian), dan (3) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Banyak pihak yang membantu kami dalam memperlancar penelitian ini. Terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Professor (R) Fadjry Djufry beserta seluruh jajaran atas dukungan yang berharga terhadap program kemitraan penelitian ini. Kepada seluruh Evaluator Monev (Ibu Dr. Asih Rohmani, Bapak Dr. Chandra Indrawanto, Bapak Ir. Agus Muharam, MS, Bapak Dr. Mamat HS), terimakasih yang mendalam atas segala saran dan masukan berharga untuk penguatan substansi dan turut mempertajam analisis. Kepada Professor Bustanul Arifin, Dr. I Ketut Kariyasa dan Professor Muslim Salam atas segala diskusinya yang tajam di berbagai diskusi akademik Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) khususnya topik Penguatan Kelembagaan Pertanian dan Resolusi Konflik Sumberdaya Pertanian. Terimakasih kepada Professor Philipus Betaubun (Rektor Universitas Musamus Merauke) yang membantu mengatasi masalah teknis, khususnya di Distrik Sota. Terima kasih juga kepada pimpinan Fakultas Pertanian, Universitas Borneo Tarakan atas dukungannya dalam mendiskusikan temuan-temuan awal penelitian di perbatasan Indonesia-Malaysia, utamanya transmisi perdagangan komoditas pertanian

di wilayah tersebut dari sudut pandang kelembagaan. Kepada Dr. Damianus Adar, Dekan Fakultas Pertanian Undana Kupang, yang sangat memahami kondisi perbatasan Indonesia-Timor Leste, terimakasih atas segala diskusinya selama kami berada di Undana. Tak lupa kami apresiasi seluruh mitra dan stakeholder yang membantu kelancaran survey di lapangan (Ir. Jumiati Mahmud, SP., MP. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merauke; Husaini T., SP. Badan Karantina Pertanian Kelas II Tarakan; Professor Orbanus Naharia, Universitas Negeri Manado; Dr. Marius Ardu Jelamu, Sekretaris Daerah NTT; Rayhana, M.Si., Khaerunnisa, M.Si., dan Nurlaela, M.Si. Universitas Borneo Tarakan). Tanpa bantuan mereka yang sangat berharga, sangat sulit dibayangkan penelitian ini tuntas di tengah Pandemi COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B., 2019. Komentar Ahli terhadap Monograf Kelembagaan Pembangunan Pertanian (oleh M. Arsyad, A Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf). Nas Media Pustaka. Makassar.
- Arsyad, M., A. Nuddin, I.M. Fahmid, D. Salman, D.A.T. Pulubuhu, A.A. Unde, F. Djufri, Darwis, 2020. Agricultural development: poverty, conflict and strategic programs in country border. Paper presented at *International Conference of Interdisciplinary Research on Green Environmental Approach for Sustainable Development*. IOP Publishing (Scopus). Vol 575(2020):012091.
- Arsyad, M. S. Yusuf, 2010. Poverty Causes-Smallholders Linkages: A Comparison of Two Villages in Indonesia, *Ryukoku Journal of Economic Studies*, 49(4):55-74.
- Arsyad, M., B.M. Sinaga, S. Yusuf, 2011. Analisis Dampak Kebijakan Pajak Ekspor terhadap Produksi dan Ekspor Kakao Indonesia Pasca Putaran Uruguay. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. 8(1):63-71.
- Arsyad, M., A. Nuddin, S. Yusuf, 2013. Strengthening Institutional towards Smallholders Welfare: Evidence from Existing Condition of Cocoa Smallholders in Sulawesi, Indonesia, *Ryukoku Journal of Economic Studies*, 52(1):71-86.
- Arsyad, M., Y. Kawamura, 2010. Reducing Poverty of Cocoa Smallholders in Indonesia: Is Agricultural Economic Activity Still the Pioneer?. *Journal of Economics and Finance in Indonesia*, 58(2):217-238.
- Arsyad, M., A. Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf, 2019. Monograf Model Kelembagaan Pertanian. Nas Media Pustaka. Makassar.
- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Barat-LPPM Universitas Sulawesi Barat, 2015. Usaha Ekonomi Desa di Provinsi Sulawesi Barat.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan, 2015. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019.
- Bangun, B.H., 2017. Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional. *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 1(1):52-63.
- Bafadal, A., 2020. Fungsionalisasi Kelembagaan Petani. Mozaik Pemikiran Perhepi Menuju Pertanian Masa Depan. Perhimpunan Ekonomi Pertanian. IPB Press. Bogor.
- Bappenas, 2013. Membangun Sistem Data base MDGs dan Program Pembangunan untuk Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jakarta.

- Center Research Institute for Estate Crops (CRIEC) - World Bank, 2002. The Performance Analysis of Cocoa (Report Studies on Smallholder Tree Crops Production and Poverty Alleviation). CRIEC-World Bank, Bogor.
- Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2013 (Tahun download). Menuju ASEAN Economic Community 2015. Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta.
- Didu, M.S. 2001. Analisis Posisi dan Peran Lembaga Serta Kebijakan Dalam Proses Pembentukan Lahan Kritis. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 2(1): 93 – 105.
- Eriyatno, 1989. Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektifitas Manajemen. IPB Press, Bogor.
- Ghafur, M. F, 2016. Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 4(2); 233-246.
- Istijono, B, 2012. Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Arah Kebijakan Menuju Kebijakan yang Terarah, *Jurnal Puskasrastra Pusat Kajian Strategis*, Juli-Desember 2012 hal 48-51.
- Kariyasa, I.K., 2019. Komentar Ahli terhadap Monograf Kelembagaan Pembangunan Pertanian (oleh M. Arsyad, A Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf)). Nas Media Pustaka. Makassar.
- Kementerian Dalam Negeri, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan.
- Kun, A. CI. C, 2013. Institutional Quality Dataset, *Journal of Institutional Economics*, 10 (1): 135-161, doi:10.1017/S1744137413000192.
- Marwasta, D., 2020 (tahun download). Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan. Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.
- Nuddin, A. 2007. Analisis Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Lahan Kritis DAS Bila. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Nuddin, A., M. Arsyad, S. Yusuf, 2013. Aplikasi Path Analisis Untuk Memformulasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Petani Kakao di Indonesia: Suatu Tawaran Untuk Bappenas. Laporan Kemajuan Hibah STRANAS Tahun ke-2, Parepare.
- Salman, D, 2019. Komentar Ahli terhadap Monograf Kelembagaan Pembangunan Pertanian (oleh M. Arsyad, A Nuddin, M.H. Jamil, S. Yusuf)). Nas Media Pustaka. Makassar.
- Sawit, M.H., Hermanto, 2017. Forum Komunikasi Professor Riset: Ragam Pemikiran Pengembangan Pertanian. IAARD Press.
- Sudiar, S. 2015. Pembangunan Wilayah Perbatasan Negara: Gambaran Tentang Strategi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat di Provinsi Kalimantan Utara, *Jurnal Administrative Reform*, 3 (4): 489-500.
- Sujiono, 2016. Model Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Kawasan Perbatasan Rawan Konflik, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 4(2), 103-108.